

Pemkot Didesak Tindaklanjuti Temuan BPK

SEMARANG – DPRD Kota Semarang mende-sak Pemkot segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang tahun anggaran 2014.

Dewan menegaskan akan terus mengawal proses tindak lanjut yang dilakukan oleh dinas terkait tersebut. Dan diharapkan pemkot dapat segera menyelesaikannya sesuai arahan dari BPK.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Semarang HA Supriyadi, usai rapat koordinasi dengan Inspektorat selaku lembaga pengendali internal Pemkot di kantor dewan kemarin. Inspektorat diundang untuk mengetahui dan menjelaskan tindak lanjut oleh 22 SKPD yang jadi obyek temuan dalam laporan hasil pemeriksaan LKPD

dari BPK.

"Inspektorat adalah sebagai lembaga pengendali intern Pemkot Semarang. Kami minta mereka harus pro aktif, mengawal dan mengawasi penyelesaian temuan dan rekomendasi dari BPK oleh seluruh SKPD yang menjadi obyek temuan," kata Supriyadi, kemarin.

Dikatakan, sebanyak 22 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sudah ada action plan un-

jadi salah satu obyek temuan paling mencolok dalam laporan hasil pemeriksaan LKPD dari BPK. Dinas ini harus menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi BPK. Yaitu agar penyimpanan kas daerah yang selama ini ada di sembilan bank dikurangi.

BPK menilai, katanya, banyaknya jumlah bank pemegang kas daerah tersebut membuat pengelolaan keuangan tidak



Gema DPRD Kota Semarang



tuk temuan dari BPK. Karena itu Inspektorat harus mengawal supaya semua sesuai arahan BPK. Hasil tindak lanjut tersebut akan dilaporkan ke BPK. Kemudian Pemkot harus membahasnya lagi respon BPK atas hasil tindak lanjut tersebut. "Dalam semua proses ini, kami akan mengawal," tegasnya.

Ia mengungkapkan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) adalah

efisien dan efektif. Termasuk laporan bunga, giro, dan deposito menjadi tidak transparan. "Untuk hal ini, DPKAD sudah menindaklanjuti dengan menjadi hanya enam bank pemegang kas daerah," tegasnya.

Dalam laporannya, Kepala Inspektorat Kota Semarang Cahyo Bintarum menjelaskan, dari laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2014 dari BPK ada 21 temuan. Terdiri dari

empat temuan kepatuhan dan 17 temuan sistem pengendalian intern (SPI), serta ada 28 rekomendasi. Sedangkan obyek temuan terdiri dari 22 SKPD.

Menurutnya, tindak lanjut sudah ada yang dilakukan sebelum laporan hasil pemeriksaan BPK diterima pada 29 Mei lalu. Misalnya kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan pembangunan Pasar Klithikan Penggaron tahap dua sebesar Rp7,5 juta pada Dinas Pasar, telah disetor ke kas daerah pada 19 Mei. Kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan pembangunan Pasar Modern Rejomulyo tahap dua sebesar Rp12,9 juta juga sudah

disetor ke kas daerah pada 19 Mei.

Kemudian, kelebihan pembayaran atas kegiatan pelaksanaan pembangunan ruang terapi pada RSUD Kota Semarang Rp5,4 juta juga sudah disetor ke kas daerah pada 20 Mei. Dan kelebihan pembayaran atas kegiatan pelaksanaan pembangunan GOR Tri Lomba Juang pada Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Rp74,6 juta juga disetor ke kas daerah pada 19 Mei.

Sementara tindak lanjut atas temuan BPK lainnya, kata Cahyo Bintarum, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah

yang diperlukan. Sebab temuan BPK harus sudah ada tindak lanjut oleh pemkot paling lambat 60 hari kerja sejak diterimanya LHP pada 29 Mei.

"Karena itu kami sudah melakukan langkah membuat surat perintah wali kota kepada dinas terkait, surat sekretaris daerah, action plan kesanggupan SKPD menindaklanjuti temuan BPK, dan rekapitulasi action plan dari SKPD yang masih dalam proses ditandatangani wali kota," jelasnya.

Seperti diketahui, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini mengundang keprihatinan dari fraksi di DPRD Kota Semarang. Pasalnya sebelumnya opini BPK RI atas Laporan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 dan 2013 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (sgt/mar)

Inspektorat adalah sebagai lembaga pengendali intern Pemkot Semarang. Kami minta mereka harus pro aktif, mengawal dan mengawasi penyelesaian temuan dan rekomendasi dari BPK oleh seluruh SKPD yang menjadi obyek temuan

HA SUPRIYADI
Ketua DPRD Kota Semarang